



Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

FORMULA BARU HARGA BATUBARA ACUAN

T. Ade Surya

Analisis Legislatif Ahli Muda
teuku.surya@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) merevisi formula harga batubara acuan (HBA) melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 41.K/MB.01/MEM.B/2023 tentang Pedoman Penetapan Harga Patokan untuk Penjualan Komoditas Batubara. Revisi formula HBA ini dilakukan sebagai bentuk dukungan pemerintah sekaligus merespons permintaan dari para pelaku usaha pertambangan batubara agar dilakukan perubahan formula HBA. Formula HBA baru dalam Keputusan Menteri ESDM ini mulai diberlakukan per bulan Maret 2023 dan dinilai lebih realistis karena lebih mencerminkan kondisi riil di lapangan di mana produk batubara berkalori tinggi di dalam negeri tidak begitu besar jumlahnya. Sebelumnya, rumusan formula HBA lebih condong mengikuti harga batubara dengan nilai kalori tinggi hasil produksi luar negeri yang mengakibatkan HBA tidak relevan dengan pasar Indonesia yang banyak memproduksi batubara berkalori rendah.

Formula HBA yang lama menghitung HBA berdasarkan harga rata-rata bulan sebelumnya yang mengacu kepada empat indeks harga batubara, yaitu *Indonesia Coal Index* (ICI), *Newcastle Export Index* (NEX), *Globalcoal Newcastle Index* (GCNC), dan *Platt's 5900*, dengan kualitas yang disetarakan pada kalori 6322 kcal/kg GAR, total *moisture* 8%, total *sulphur* 0,8%, dan *ash* 15%. Dengan formula ini, jika terjadi lonjakan harga berdasarkan empat indeks di atas maka HBA menjadi tinggi sedangkan harga jual rendah karena kebanyakan batubara yang diproduksi di dalam negeri berkalori rendah. Hal ini akan memberatkan industri karena royalti dibebankan berdasarkan HBA.

Sementara dengan formula baru, perhitungan HBA menggunakan rata-rata harga jual batubara dua bulan sebelumnya, namun dengan persentase yang berbeda, yaitu 70% pada bulan sebelumnya dan 30% di dua bulan sebelumnya. Harga jual batubara dua bulan sebelumnya dihimpun dari realisasi sistem elektronik penerimaan negara bukan pajak atau e-PNBP setiap bulannya, untuk menghitung persentase harga jual riil batubara yang diterima perusahaan. Formula baru HBA ini dapat mengurangi gap atau selisih antara HBA dengan harga jual sehingga akan lebih adil bagi pemerintah maupun para pelaku usaha pertambangan batubara.

Namun demikian, pemerintah masih perlu memberikan sosialisasi dan penjelasan teknis mengenai perhitungan HBA dengan formula yang baru kepada para pelaku usaha pertambangan, khususnya terkait simulasi perhitungannya. Adanya revisi formula HBA ini juga tidak akan mengubah target produksi batubara nasional, kecuali perubahan yang diajukan oleh badan usaha sesuai dengan kinerja perusahaan. Pada tahun 2023 ini pemerintah menargetkan produksi batubara mencapai 694 juta ton, sementara realisasi produksi batubara pada tahun sebelumnya mencapai 687 juta ton atau 103% dari target 663 juta ton.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih



EDITOR

Polhukam
Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

Ekkuinbang
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Rafika Sari
Eka Budiyantri
Dewi Wuryandani

Kesra
Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.

Atensi DPR

Pemerintah merevisi formula HBA sebagai bentuk dukungan kepada para pelaku usaha pertambangan batubara yang menilai formula HBA yang selama ini digunakan tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Formula HBA yang lama lebih condong mengikuti harga batubara dengan nilai kalori tinggi hasil produksi luar negeri yang mengakibatkan HBA tidak relevan dengan pasar Indonesia yang banyak memproduksi batubara berkalori rendah. Dengan formula baru HBA diharapkan dapat mengurangi gap antara HBA dengan harga jual sehingga akan lebih adil bagi pemerintah maupun para pelaku usaha pertambangan batubara. Namun, pemerintah masih perlu memberikan sosialisasi dan penjelasan teknis mengenai perhitungan HBA dengan formula yang baru kepada para pelaku usaha pertambangan, khususnya terkait simulasi perhitungannya. DPR RI khususnya Komisi VII DPR RI yang membidangi energi perlu melakukan pengawasan terkait perubahan formula HBA ini, untuk memastikan implementasinya dapat berjalan dengan baik.

Sumber

cnbcindonesia.com, 13 Maret 2023;
ekonomi.bisnis.com, 8 Maret 2023; dan
Kontan, 11 dan 13 Maret 2023.